

BAB 2

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori *Stakeholder*

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa suatu entitas mencoba menelaraskan aktivitasnya dengan harapan *stakeholder* (Barako and Brown, 2008). *Stakeholder* dapat diidentifikasi sebagai *group* atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Rankin et al., 2012). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial (Donaldson and Preston, 1955) dalam (Rankin et al., 2012).

Menurut Deegan (2004), seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana aktifitas organisasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan *stakeholder* untuk mencari dukungan dari para *stakeholder*. Apabila perusahaan tidak memperhatikan kepentingan *stakeholder*, perusahaan akan terancam kehilangan kepercayaan dari *stakeholder*. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi terkait pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para *stakeholdernya*. Pengungkapan tersebut dapat menunjukkan bahwa perusahaan serius dalam menanggapi isu

lingkungan terutama terkait dengan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh pengawasan dewan komisaris.

2.2. Pengungkapan Emisi Karbon

Emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Berbicara tentang emisi karbon berarti berbicara tentang emisi gas rumah kaca sebagai kontributor utama perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca sering dihitung sebagai ekuivalen karbondioksida. Oleh karena itu, emisi tersebut sering disebut sebagai emisi karbon ketika membahas pemanasan global atau efek rumah kaca (www.ecolife.com).

Menurut Andrew and Cortese (2011), pengungkapan emisi karbon adalah sejenis pengungkapan lingkungan dan dianggap sebagai tindakan sukarela. Pengungkapan emisi karbon diharapkan dapat memberikan citra yang baik bagi perusahaan karena perusahaan dianggap bertanggungjawab secara sosial dan peduli terhadap lingkungan yang terpengaruh oleh kegiatan operasional perusahaan (Hapsoro and Ambarwati, 2018).

2.3. Dewan Komisaris

UU no. 40 tahun 2007 menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris menelaah laporan tahunan yang akan disajikan oleh dewan direksi kepada RUPS. Salah

satu yang harus dilaporkan dalam laporan tahunan tersebut adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan emisi karbon adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ada dalam laporan tahunan. Dewan komisaris memberikan nasihat kepada direksi salah satunya nasihat terkait pengungkapan emisi karbon agar selaras dengan yang diharapkan oleh *stakeholder*. Jadi peran komisaris adalah mendorong perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para *stakeholder*.

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Salah satu kebijakan pengurusan dalam perseroan yang diawasi oleh dewan komisaris adalah kebijakan terkait pengungkapan emisi karbon. Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris (UU no. 40 tahun 2007). Kewajiban dewan komisaris menurut UU no. 40 tahun 2007 adalah:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

2.3.1. Ukuran Dewan Komisaris

Board size didefinisikan sebagai jumlah anggota *board of director* (Appuhami and Bhuyan, 2015). *Board of directors* bertanggungjawab untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan dan mengawasi penggunaan aset perusahaan secara bijaksana (Jizi et al., 2014). *Board of directors* juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa lingkungan material risiko dipantau dengan baik dan diungkapkan sepenuhnya (Amar et al., 2017).

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Fama and Jensen, 1983). Jumlah komisaris yang lebih banyak dapat meningkatkan kapasitas pemantauan dewan dan kemampuan untuk mempromosikan kegiatan yang menciptakan nilai perusahaan (Akhtaruddin et al., 2009). Oleh karena itu, perusahaan dengan dewan komisaris yang lebih besar cenderung untuk melaporkan informasi terkait pengungkapan emisi karbon.

2.3.2. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik atau *code of good corporate governance* adalah komisaris dari pihak luar. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan

komisaris lainnya. Komisaris independen diharapkan mampu menjaga independensinya sehingga dalam melakukan pengawasan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan hanya berfokus pada kepentingan perusahaan (UU no. 40 tahun 2007). Komisaris independen dengan independensinya dinilai mampu mempertahankan transparansi dan keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan (Jizi et al., 2014).

2.3.3. Proporsi Dewan Komisaris Wanita

Board diversity didefinisikan sebagai berbagai komposisi *board of director* yang dapat dikategorikan dalam aspek yang dapat diamati secara langsung (jenis kelamin, usia, etnis) dan aspek yang kurang terlihat (pendidikan dan pengalaman kerja) (Galia and Zenou, 2012). Sedangkan menurut Coffey and Wang (1998), keberagaman dewan didefinisikan sebagai satu variasi di antara beberapa karakteristik anggota dewan seperti keahlian, kepribadian, gaya belajar, latar belakang, pendidikan, usia, dan pengalaman.

Menurut Post et al. (2011), keragaman dalam dewan komisaris dapat meningkatkan kemungkinan bahwa pengetahuan, perspektif, dan ide-ide yang beragam dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Keragaman dalam suatu kelompok, baik itu usia, latar belakang budaya maupun pendidikan dapat membawa keanekaragaman informasi, keragaman kategori sosial, serta keragaman nilai yang dianut masing-masing anggota (Jehn et al., 1999).

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kilic and Kuzey (2019) dengan judul “*The Effect of Corporate Governance on Carbon Emission Disclosures: Evidence from Turkey*” menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Istanbul (BIST) kecuali perusahaan asuransi, keuangan, dan olahraga tahun 2011-2015 sebagai obyek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Sumber data yang digunakan adalah laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *board size* dan *board diversity gender* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan CDI maupun RCDP sedangkan variabel *board independence* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan RCDP namun tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan CDI. Variabel *board diversity nationality* dan *sustainable committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Ada 5 variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, karakteristik industri dan *foreign listing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan karakteristik industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon baik yang diukur dengan CDI maupun RCDP sedangkan variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE, *leverage*, dan *foreign listing* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon baik yang diukur menggunakan CDI maupun RCDP.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trufvisa dan Ardiyanto (2019) dengan judul “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Emisi Karbon” menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 sebagai obyek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Sumber data yang digunakan adalah laporan tahunan dan *sustainability report* perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah variabel komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon sedangkan variabel ukuran dewan komisaris, keragaman *gender* dalam dewan komisaris, dan keragaman kebangsaan dalam dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasih et al., (2019) yang berjudul *Carbon Emissions, Firm Size and Corporate Governance Structure: Evidence from the Mining and Agricultural Industries in Indonesia* menggunakan seluruh perusahaan industri pertambangan dan pertanian yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016 sebagai obyek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan multivariat. Sumber data yang digunakan adalah laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah variabel *firm size, board size, and characteristic industry* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

sedangkan *board independence* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Liao et al., (2014) yang berjudul *Gender Diversity, Board Independence, Environmental Committee and Green House Gas Disclosure* menggunakan 350 perusahaan yang terdiri dari 10 sektor yang termasuk dalam laporan CDP FTSE350 2011 sebagai obyek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi probit. Sumber data yang digunakan adalah laporan tahunan 2010 dan laporan CDP 2011. Hasil dari penelitian ini adalah *gender diversity, board independence, dan environmental committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan gas rumah kaca.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *board size, board meeting, non exechair, non exedir, duality, short bonus, share option, long term bonus, exedir share, non exedir share, dan concentration*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *board size, long term bonus, share option, dan non exedir share* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Variabel *short bonus, exedir share, dan concentration* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Variabel *board meeting, non exechair, dan duality* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Keberadaan komisaris yang semakin besar dapat memberikan pengawasan dan memastikan bahwa direksi bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan mampu memberikan transparansi informasi mengenai aktivitas perusahaan (Trufvisa dan Ardiyanto, 2019).

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa suatu entitas mencoba menyelaraskan aktivitasnya dengan harapan *stakeholder* (Barako and Brown, 2008). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka tingkat pengawasan yang diberikan oleh dewan komisaris juga akan lebih tinggi. Jika tingkat pengawasannya tinggi, dewan komisaris itu bisa memastikan dewan direksi bertindak sesuai dengan keinginan para *stakeholder*. Selain itu, kehadiran dewan komisaris diharapkan dapat mengontrol aktivitas perusahaan agar selaras dengan harapan para *stakeholder* sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Barako and Brown (2008). Salah satu hal yang diinginkan para *stakeholder* adalah transparansi informasi mengenai pengungkapan emisi karbon. Oleh karena itu, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan emisi karbon.

Teori tersebut didukung oleh penelitian Nasih et al., (2019) yang menyatakan bahwa *board size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, hal ini tidak didukung oleh penelitian Kilic and Kuzey (2019) yang menyatakan *board size* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon dan penelitian Trufvisa dan Ardiyanto (2019) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

2.5.2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Komisaris independen diharapkan sangat berhasil dalam mengawasi manajemen dalam hal meningkatkan nilai jangka panjang dan mempertahankan tingkat transparansi yang tinggi (Jizi et al., 2014). Dalam premis teori pemangku kepentingan, komisaris eksternal mengalami tekanan yang lebih rendah dari pemegang saham dan manajer dibandingkan dengan komisaris internal (Hussain et al., 2016).

Deegan (2004) menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana aktifitas organisasi perusahaan.

Perusahaan akan berusaha untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan *stakeholder* untuk mencari dukungan dari para *stakeholder*. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi pengungkapan emisi karbon. Komisaris independen/eksternal mendapatkan tekanan yang lebih kecil daripada komisaris internal. Diharapkan tingkat pengawasan yang diberikan oleh komisaris independen lebih besar sehingga memperluas kepekaan terhadap tuntutan sosial. Salah satu tuntutan sosial yang dimaksud adalah pengungkapan emisi karbon. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung mengungkapkan emisi karbon dengan kehadiran dewan komisaris independen.

Teori tersebut didukung oleh penelitian Kilic and Kuzey (2019) yang diukur menggunakan RCDP yang mengatakan *board independence* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, penelitian Trufvisa dan Ardiyanto (2019) yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, dan penelitian Liao et al., (2014) yang menyatakan *board independence* berpengaruh positif terhadap pengungkapan gas rumah kaca. Namun, teori tersebut tidak didukung oleh penelitian Kilic and Kuzey (2019) yang diukur menggunakan CDI menyatakan *board independence* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Di sisi lain, penelitian Nasih et al., (2019) menyatakan bahwa *board independence* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdahulu, dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2: proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.5.3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Wanita terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kehadiran komisaris wanita yang lebih banyak meningkatkan keragaman pendapat dalam diskusi dewan (Barako and Brown, 2008). Dengan demikian, kehadiran komisaris wanita memastikan pertimbangan perspektif yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan komunikasi dewan (Bear et al., 2010). Menurut Fukukawa et al. (2007), perempuan cenderung untuk mengambil tindakan mengurangi risiko lingkungan. Selain itu, Hofstede et al. (2010) mengatakan perempuan lebih peduli akan kualitas hidup daripada kesuksesan materi, yang mana hal tersebut dapat memberikan hubungan langsung pada masalah lingkungan.

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa suatu entitas mencoba menyelaraskan aktivitasnya dengan harapan *stakeholder* (Barako and Brown, 2008). Salah satu harapan *stakeholder* adalah pengungkapan informasi terkait emisi karbon oleh perusahaan. Diharapkan kehadiran perempuan di dewan komisaris dapat mendorong perusahaan mengungkapkan informasi terkait emisi karbon sesuai dengan harapan *stakeholder*. Perempuan lebih peduli dengan masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang dimaksud terkait dengan pengungkapan emisi karbon. Semakin banyak dewan komisaris wanita yang ada di perusahaan berarti semakin

banyak pendapat dan pertimbangan terkait lingkungan yang bisa diberikan dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi, perusahaan akan cenderung mengungkapkan emisi karbon dengan kehadiran wanita di dewan komisaris.

Teori tersebut didukung oleh penelitian Liao et al., (2014) yang menyatakan *gender diversity* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, penelitian Kilic and Kuzey (2019) menyatakan *board diversity gender* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon dan Trufvisa dan Ardiyanto (2019) menyatakan keragaman *gender* dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdahulu, dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3: Proporsi dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon